



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

PERATURAN BUPATI SUMBAWA

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2029**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025**



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 85 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
- a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:

BAB I	:	Pendahuluan;
BAB II	:	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
BAB III	:	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
BAB IV	:	Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
BAB V	:	Penutup.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa

pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,



Diundangkan di Sumbawa

pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BULI PEASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR 85

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1	Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.1.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	6
2.1.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.1.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.1.4	Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.1.5	Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	24
2.1.6	Dukungan BUMD Dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.	24
2.1.7	Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Daerah	24
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	25
2.2.1	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3	Isu Strategis	29

BAB III TUJUAN SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1	Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029	31
3.2	Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029	33
3.3	Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.....	34
3.4	Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029	36

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1	Uraian Program.....	39
4.2	Uraian Kegiatan dan Rumusan Kegiatan.....	39
4.3	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	55
4.4	Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	75
4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Ta.2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).....	80
4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	81

BAB V P E N U T U P

5.1	Kesimpulan Penting Subtansial	83
5.2	Kaidah Pelaksanaan	84

Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 85 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2025-2029

BAB. I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 256 bahwa satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas sebagai penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Permendagri 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketenetraan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Rencana Strategis SatpolPP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan salah satu instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa. Dokumen perencanaan ini disusun untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Sumbawa dan wakil Bupati Sumbawa terpilih, adapun Visinya “ ***Unggul Maju dan Sejahtera***” dengan Misi ***1. Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul, 2. Pemerintahan dan Birokrasi Unggul, 3. Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul, 4. Perekonomian Maju 5. Masyarakat Sejahtera.***

Penyusunan Rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 mempertimbangkan berbagai kondisi yang mempengaruhi perekonomian daerah, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Rencana Strategis ini diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Penyusunan Rencana Strategis ini juga mempertimbangkan potensi dan masalah yang berkenaan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketrtiban Umum, serta isu strategis pembangunan, baik global, nasional, regional maupun lokal. Pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024), Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa capaian kinerja baik indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci serta indikator kinerja

lainnya menunjukkan dalam capaian yang baik yang berdampak signifikan bagi dinamika pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sumbawa.

Potensi/kekuatan (keunggulan) Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang berpeluang mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, akuntabilitas kinerja dan implementasi reformasi birokrasi yang konsisten meningkat, serta achievement yang didorong oleh perangkat daerah terus dicapai menjadi motivasi yang sangat baik dalam meningkatkan kinerja.

Beberapa masalah/kendala (kelemahan) dalam lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) yang perlu diatasi agar mendukung pembangunan tahun 2025-2029 antara lain: kualitas dan kuantitas SDM SatpolPP yang belum optimal, Saranan dan Prasarana yang belum sesuai standar. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas belum sesuai dengan rencana kegiatan.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 mencakup pengintegrasian data empiris, evaluasi kinerja, serta analisis mendalam terhadap kondisi umum perangkat daerah, sehingga setiap kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara realistis dan terukur. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan sinergi antar perangkat daerah dan antara tingkatan pemerintah.

Selain berkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dalam perangkat daerah itu sendiri, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa ini juga memiliki hubungan dan keterkaitan dengan proses penyusunan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sumbawa, proses penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah provinsi terkait, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait. Dengan demikian, Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, akan terkait dengan Rencana Kerja (Renja) itu sendiri, serta terkait pula dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yaitu RPJMD dan RPJPD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam upaya memastikan akuntabilitas, transparansi, dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 5) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 686);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 697);
- 9) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 56);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan wilayah sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa periode 2025-2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, serta indikator kinerja pembangunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja sesuai dengan situasi dan kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.

1.4 Sistematika penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontent pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjarangan aspirasi yang berkaitan dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai Trantibum dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab III terdiri dari tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 berdasarkan NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Selain itu, pada Bab ini juga disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, termasuk pentahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

2.1 Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Trantibumlinmas Sub Urusan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 Nomor 56); merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Trantibumlinmas Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas Penegakan Perda/Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat; Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Program penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta pelindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta pelindungan masyarakat;
4. Pengawasan terhadap masyarakat aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;
5. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketententuan peraturan perundang-undangan;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 5 (lima) Unit Eselon III yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan sebagai berikut :

1. Sekretaris selaku unsur pembantu pimpinan;
2. Terdapat 4 (Empat) Bidang teknis selaku unsur pelaksana yaitu:
 - a. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-Undangan
 - c. Bidang Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - d. Bidang Perlindungan masyarakat

Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Uraian Tugas Dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Jabatan	Tugas	Fungsi
1	Kepala Satuan	Membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan kepala Daerah.	a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidang penegakan perundang-undangan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, kapasitas sumber daya aparatur serta perlindungan masyarakat; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris Satuan	melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian	a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
3	Kepala Bidang Penegakan Perundang-	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan;

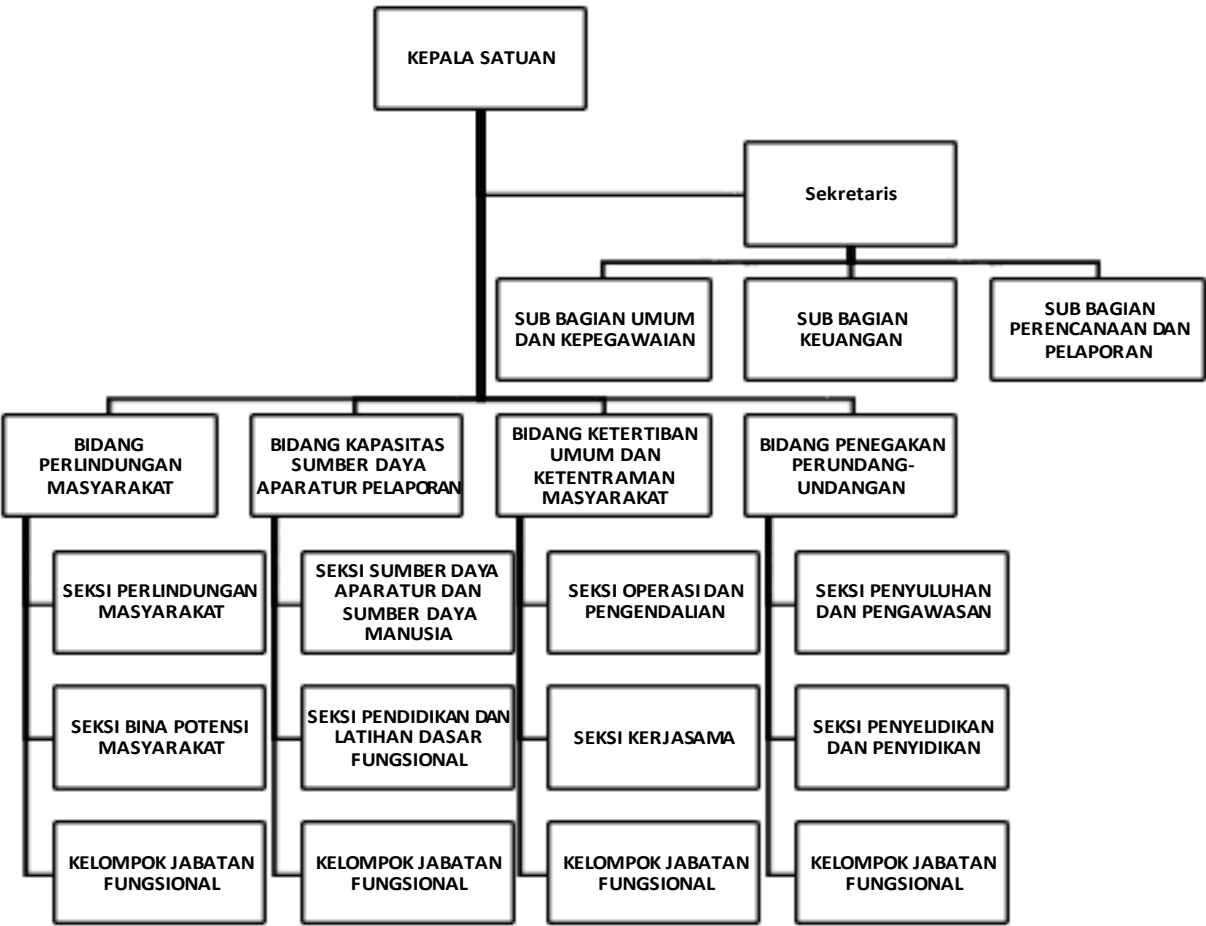
No	Jabatan	Tugas	Fungsi
	undangan Daerah	bidang penegakan perundang-undangan daerah	b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketertiban Umum dan	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian dan kerja sama; b. penyusunan kebijakan teknis Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Operasi, Pengendalian dan Kerja Sama; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi, pengendalian dan kerja sama; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5	Kepala Bidang Kapasitas Sumber Daya Aparatur	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur	a. penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang peningkatan sumber daya aparatur/sumber daya manusia, pendidikan dan latihan dasar, dan fungsional; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya aparatur/sumber daya manusia, pendidikan dan latihan dasar, dan fungsional; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6	Kepala Bidang Perlindungan masyarakat	merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat.	a. Penyusunan bahan perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat dan bina potensi perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi perlindungan masyarakat; dan c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

GAMBAR 2.1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya SatpolPP berdasarkan Permendagri 17 Tahun 2019 Pasal 3 huruf C bahwa SatpolPP dapat memperoleh hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Hak lain yang dimaksud berdasarkan pasal 6 yaitu “dapat berupa tunjangan resiko dan insentif lainnya”

2.1.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja



2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan permendagri 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja, hasil perhitungan jumlah kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mendapat skor sebesar 550 sehingga jumlah kebutuhan SatpolPP berada pada kisaran 250-350 orang. Pada kondisi saat ini dalam menjalankan tupoksinya Satuan Pamong Praja Kabupaten Sumbawa berjumlah 196 yang terdiri dari PNS dan Non PNS (Tenaga Kontrak) sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 2.1 Jumlah Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sumbawa

No	Status	Jenis Kelamin	2021	2022	2023	2024
1	PNS	LAKI-LAKI	32	32	32	29
		PEREMPUAN	9	9	9	8
2	NON PNS	LAKI-LAKI	148	148	150	148
		PEREMPUAN	11	11	11	11
Jumlah			200	200	200	197

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian SatpolPP Kab. Sumbawa, Desember 2024

Jumlah anggota SatpolPP dari Tahun 2021 sampai dengan saat ini tidak ada penambahan, sehingga berdasarkan penetapan jumlah kebutuhan saat ini Satuan Polisi Pamong Praja masih kekurangan sebanyak 50 personil dalam menunjang urusan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai berdasarkan eselon
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Status	Jumlah	Jenis kelamin	Jumlah	Jumlah Jabatan		
					Struktural	Fungsional	Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PNS	37	LAKI-LAKI	29	ESELON II : 1	13	6
			PEREMPUAN	8	ESELON III : 5		
					ESELON IV : 11		

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2024

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat bahwa ASN Pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa adaah 196 orang terdiri dari PNS 37 orang atau 18% dan sisanya 159 orang atau 82% Non ASN atau disebut juga dengan Bantuan polisi Pamong Praja (Banpol PP). Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Satpol PP yang berjenis kelamin laki-laki 179 orang (91%) dan sisanya 17 orang atau 9% berjenis kelamin perempuan. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa pejabat struktural eselon II berjumlah 1 orang, eselon III berjumlah 5 orang dan pejabat struktural eselon IV berjumlah 11 orang, dapat disimpulkan bahwa tidak ada jabatan struktural yang lowong di satpol PP, semua jabatan struktural sudah terisi. Jumlah pegawai Satpol PP berdasarkan pangkat, golongan dan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Pendidikan

No	Pangkat	Golongan	Pendidikan				Jumlah
			SMA	D3	S1	S2	
1	Pembina Utama Muda	IV/c			1		1
2	Pembina TK. I	IV/b					
3	Pembina	IV/a			3	2	5
4	Penata TK. I	III/d			8	1	9
5	Penata	III/c			2		2
6	Penata Muda TK. I	III/b			10	1	11
7	Penata Muda	III/a	4				4
8	Pengatur TK. I	II/d	6				6
9	Pengatur	II/c					
10	Pengatur Muda TK.I	II/b					
	Total		10		23	4	37

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Kab. Sumbawa Desember 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari tabel diatas dapat dilihat bahwa PNS Satpol PP sebagian besar (26%) berpendidikan S1, 5% yang sudah menempuh pendidikan S2 dan sisanya sebanyak 68% berpendidikan SLTA. Untuk meningkatkan kapasitas pegawai Satpol PP dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,telah dilakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang sudah mengikuti Diklat

NO	Jenis Diklat	Jumlah (Orang)
1	2	3
1.	DIKLAT PIM II	-
2.	DIKLAT PIM III	2
3.	DIKLAT PIM IV	3
4.	DIKLATSAR POL PP POLA 30 JP	-
5.	DIKLATSAR POL PP POLA 50 JP	-
6.	DIKLATSAR POL PP POLA 100 JP	-
7.	DIKLATSAR POL PP POLA 150 JP	-
8.	DIKLATSAR POL PP POLA 300 JP	15
9.	BIMTEK FUNGSIONAL	9
10.	DIKLAT PPNS	3

Sumber : Sub Bagian Umum & Kepegawaian Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai PNS SatpolPP yang sudah mengikuti Diklat dasar berjumlah 20 orang atau 49% dan 51% belum mengikuti diklat dasar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 19 ayat (1), “Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar”.Dari tabel diatas juga dapat dilihat, bahwa pegawai Pol PP yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan PIM IV baru 27 % dari total 11 orang pejabat eselon IV, dan sisanya 73% belum mengikuti diklat kepemimpinan PIM IV.

Dalam rangka penegakan perda dan perkara, pengembangan kapasitas pegawai Satpol PP dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan PPNS. Jumlah PPNS yang tersebar di beberapa perangkat daerah di Kabupaten Sumbawa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah PPNS di Kabupaten Sumbawa

NO	TEMPAT TUGAS PPNS	JUMLAH
1.	Dinas PUPR	1
2.	Bagian Pembangunan Setda Kab. Sumbawa	1
3.	Diskoperindag	3
4.	Satpol PP	3
5.	Dinas Perhubungan	1
6.	BPBD	1
7.	Kecamatan Lape	1
8.	Dinas peternakan	1
9.	Dinas Perhubungan	2
	TOTAL	13

Sumber : Bidang KSDA Satpol PP Kab. Sumbawa Desember 2024

Keberadaan pegawai non PNS Satpol PP (Tenaga Kontrak) sangat berkontribusi dalam mendukung kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tupoksinya. Jumlah tenaga kontrak berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 2.6Jumlah Tenaga Non ASN
(BANPOL PP) Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-2	-
2.	S-1	30
3.	D-3	3
4.	SLTA	126
5.	SLTP	-
6.	PAKET C	-
7.	PAKET B	-
8.	SD	-
TOTAL		159

Bagian Umum dan Kepegawaian, Desember 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa tenaga kontrak berjumlah 158 orang. 25 orang (16%) dari total Tenaga Kontrak berpendidikan S1, 1 orang (0,6%) berpendidikan D3 dan sisanya 132 orang (86%) berpendidikan SMA. Komponen lain yang membantu tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah anggota Linmas. Anggota ini tersebar di beberapa kecamatan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Jumlah Anggota Satlinmas yang telah Diklat

No	KECAMATAN	JUMLAH LINMAS TERLATIH (ORANG)
1	LABUHAN BADAS	30
2	UNTER IWES	30
3	ALAS	30
4	MOYO HULU	30
5	LAPE	30
6	MOYO HILIR	30
7	LUNYUK	30
8	ALAS BARAT	30
9	UTAN	30
10	LOPOK	30
11	MOYO UTARA	30
12	LENANGGUAR	31
13	BUER	31
14	RHEE	31
15	LABANGKA	31
	JUMLAH	730

Sumber : Bidang Linmas Satpol PP Kab. Sumbawa, Desember 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa anggota Satlinmas yang tersebar di beberapa kecamatan yang telah mendapatkan pelatihan dari Satpol PP berjumlah 730 orang.

2.1.2.2 Sumber Daya Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Asset berupa sarana dan prasarana yang tersedia sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan target kinerja yang telah direncanakan. Adapun kondisi dan keadaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa disajikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Berikut disajikan data KIB (Kartu Inventaris Barang) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2020, yang terdiri atas :

- a. Asset peralatan dan mesin; dan
- b. Asset gedung dan bangunan;

1. Daftar inventaris Gedung dan Bangunan

Tabel 2.8 aset tanah bangunan Gedung

NO	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	TAHUN PENGADAAN	LOKASI / LETAK	STATUS	PENGUNAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah dan Gedung Bagunan	114 M ²	-	Jln Garuda No. 1 Sumbawa Besar	Pinjam Gedung	Kantor Satpol PP

2. Inventaris Peralatan dan Mesin

Adapun sumberdaya peralatan dan mesin sebagai pendukung pelaksanaan tugas secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.9 Daftar Inventaris Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2024

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
2024	Meja 1/2 Biro	Lokal / 1/2 Biro	Pembelian	2,650.00	Meja Bendahara
	Kursi Lipat	Chitose / Type Echool 127-141 cm	Pembelian	6,125.00	Kursi P2U
	P.C Unit	Asus / ASUS PC ALL IN ONE A3402WBAK i5-1235U 16GB 512GB 2	Pembelian	23,794.00	Pc Unit P2u + Honorarium PPBJ
	Lap Top	Axioo / Laptop Axioo Mybook Hype 1 Intel N4020 Ram 8GB SSD	Pembelian	5,600.00	Laptop P2U
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Epson L 5290 PRINT SCAN COPY FAKS WIFI	Pembelian	7,100.00	Printer P2U
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson Scanner / Epson WorkForce DS-530II	Pembelian	36,460.00	Sekretariat Satpol PP + Honor PPK

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson Scanner / Epson WorkForce DS-530II	Pembelian	18,230.00	Sekretariat Satpol PP + honorarium PPK
2023	Sepeda Motor	ALL NEW NMAX 155 /ABS / ABS	Pembelian	52,190.00	Motor Kepala Bidan Trantibumas + Honor PPK
	Sound System	DAT / DT1511 ECOPLUS SPEAKER TROLLEY 15 INCH + 2 MIC WLE	Pembelian	2,876.00	Sound System Satpol PP Sekretariat
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Meja Kerja / Setengah Biro	Pembelian	2,652.00	Meja Kerja Kasubbag Perencanaan
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Acero / E-6515B	Pembelian	3,500.00	Kursi Kerja Kasad
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Brother / BR-106 AH	Pembelian	3,764.00	Kursi Kasi Dikltsarfung dan Kursi Kasi Penyidik
	Lap Top	Asus TUF GAMING / F15 FX506HE-I7R5B6T-O11 I7-11800H/8GBx2/512 GB SSD/	Pembelian	27,344.00	Laptop Kasubbag Pelaporan+ Honorarium PPBJ
	Lap Top	Asus Expertbook / Flip B7402FBA 2IN1 Touch	Pembelian	20,000.00	Kasi Penyuluhan dan Pengawasan
	Note Book	Asus / A416MAO-FHD425/SL	Pembelian	9,000.00	Note Book Pak Kasad
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson / L3210 L 3210 Print Scan Copy	Pembelian	4,080.00	Printer Bagian Umum dan Kepegawaian
2022	Lap Top	AIO Lenovo A340-221WL / A340-221WL	Pembelian	10,000.00	Laptop Satpol PP
	Lemari Besi/Metal	Brother / Dua Pintu	Pembelian	6,969.00	Lemari Arsip + Honor PPHP + PPBJ
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Donati / Putar	Pembelian	6,645.00	Satpol PP
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L4150 / L4150	Pembelian	25,320.00	Printer Epson + Honor PPK

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L 3210 / L 3210	Pembelian	4,000.00	Satpol PP
2021					
	Lemari Besi/Metal	Pintu Dorong / Pintu Dorong	Pembelian	2,800.00	Sekretariat
	Lemari Besi/Metal	lemari arsip / Dua Pintu	Pembelian	4,374.00	Bidang P2UU
	Lemari Besi/Metal	lemari arsip / Pintu Dorong	Pembelian	4,374.00	Sekretariat
	LCD Projector/Info cus	LCD / MW 560	Pembelian	4,680.00	Bidang P2UU
	Alat Deteksi Pita Cukai Palsu/ Video Spectral Comparator	-	Pembelian	625	Bidang P2UU
	Kursi Fiber Glas/Plastik	kursi plastic	Pembelian	1,350.00	Sekterariat
	Kipas Angin	Maspion / Berdiri	Pembelian	9,075.00	Sekretariat
	Camera film	Canon 1200D / 1200D	Pembelian	5,100.00	Bidang P2UU
	Handy Talky (HT)	Icom / ic v86	Pembelian	32,718.00	HT,Pengurusan Ijin Pemasangan Jaringan Radio,Kekurangan Belanja Modal Radio,Program dan Integrasi ke Reapater + Honor PPHP
	P.C Unit	AIO Lenovo / Voltase 20 Vdc Core i3	Pembelian	10,000.00	bidang P2UU
	P.C Unit	AIO Lenovo / i5 12450H	Pembelian	16,500.00	bidang P2UU
	Note Book	ASUS K413EA / K413EA	Pembelian	15,000.00	Bidang P2UU
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Epson / L 3210	Pembelian	4,000.00	bidang P2UU
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	printer scanen / Type L4160 Scan Copy Duplex Wifi	Pembelian	5,300.00	Sekretariat

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L5190 ALL IN WIHT ADF / L5190 ALL IN WIHT ADF	Pembelian	6,000.00	Bidang P2UU
2020	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Tanika	Pembelian	9,455.50	Hand sprayer dari BTT
	Kursi Fiber Glas/Plastik	Napoly	Pembelian	1,200.00	Kursi Plastik dari BTT
	Camera Film	Canon / EOS 600D	Pembelian	4,770.00	Satuan Polisi Pamong Praja
	Personal Computer	Lenovo / A340-241CB-BAID	Pembelian	16,700.00	Satuan Polisi Pamong Praja + Honor PPK,PPBJ,PP HP
2019	Lemari Penyimpan	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	4,000.00	Lemari Arsip
	Kipas Angin	Mayako / Duduk	Pembelian	1,499.96	Kipas Angin satpolpp
	Kipas Angin	Mayaka / Berdiri	Pembelian	1,500.00	Kipas Angin
	Kipas Angin	Mayaka / Berdiri	Pembelian	1,500.00	Kipas Angin
	Topeng (masker) Gas	-	Pembelian	1,800.00	Masker Gas
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	3,000.00	Meja Kerja Eselon II
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	3,000.00	Meja Kerja Eselon II
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	3,500.00	Meja Kerja Eselon III
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	3,500.00	Meja Kerja Eselon III
	FPM Target Holder Assembly	Lokal / Lokal	Pembelian	1,000.00	Paching Pad Sedang
	FPM Target Holder Assembly	Lokal / Lokal	Pembelian	1,500.00	Peching Box
	FPM Target Holder Assembly	lokal / Lokal	Pembelian	1,500.00	Kicking Pad
	Helm Teknik	-	Pembelian	1,800.00	Helm
	alat keamanan lainnya (dst)	-	Pembelian	2,250.00	Alat Kejut Listrik

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	1,350.00	Tonfa dan Holster Tompa
	Borgol	-	Pembelian	900	Borgol Tangan
	Rompi dan Pelindung Kaki/Tangan	Pph / Kain Hitam Tebal	Pembelian	42,540.00	Rompi/body Protector
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	2,589.00	Tameng
	Tameng	Fibrglas / Tembus Pandang	Pembelian	863	Tameng
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	1,726.00	Tameng
	Lap Top	Toshiba / Core i5	Pembelian	18,400.00	Lap Top
2018	Lemari Besi/Metal	Brother / Dua Pintu	Pembelian	4,600.00	
	Papan Nama Instansi	papan struktur	Pembelian	1,500.00	
	Papan Pengumuman	Lokal / Lokal	Pembelian	2,250.00	
	Alat Kantor Lainnya	Lokal / Lokal	Pembelian	4,350.00	Taplak Meja Rempel Satpol – PP
	Alat Kantor Lainnya	Lokal / Lokal	Pembelian	10,150.00	Taplak Meja Rempel Satpol – PP
	Mesin Pemotong Rumput	Sthil / BG 328	Pembelian	2,260.00	
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	6,000.00	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Berputar	Pembelian	2,215.00	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / Berputar	Pembelian	2,215.00	
	Lap Top	Asus / core TM15-702	Pembelian	18,700.00	Perbelanjaan Lap top + Honor
	Lap Top	Asus / core TM i3-825ou	Pembelian	8,500.00	
2017	Pompa Air	Zimizhu / PS- 130 BIT	Pembelian	1,000.00	Mesin Kompa Air Satpol pp Kabupaten Sumbawa
	Pick Up	Mitsubishi / Triton 2,5L DC Exceed-H 4X4 M/T	Pembelian	487,640.00	Pick up Double Cabin 1
	Yeengler/Trail er	Kawasaki / KLX150BF AMA	Pembelian	39,528.00	Kendaraan dinas roda

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
					dua Type Trail 2
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / Satu Biro	Pembelian	3,600.00	Kursi Kerja Eselon II Stpol PP Kabupaten Sumbawa
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Donati / Putar	Pembelian	3,935.00	Kursi Kerja Eselon II Satpol pp Kabupaten Sumbawa
	P.C Unit	Lenovo / F0D5	Pembelian	30,000.00	PC Unit /Komputer Satpol pp Kabupaten Sumbawa
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Brother / DCP -T710 w	Pembelian	2,900.00	Printer Satpol pp Kabupaten Sumbawa
2016	Lap Top	azus / i5	Pembelian	6,500.00	laptop kantor satpol-pp
	Lap Top	Tosibah / Core i5	Pembelian	14,040.00	Lap Top 17 In
	Lemari Penyimpan	Lokal / Pintu Dorong	Pembelian	3,500.00	
	Lemari Penyimpan	Lokal / Pintu Dorong	Pembelian	3,500.00	
	Mesin Hitung Manual	Citizen	Pembelian	200	Ekstrakompabel
	Kipas Angin	Maspion / Berdiri	Pembelian	1,400.00	Ekstakompabel
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	Lokal / Lokal	Pembelian	1,250.00	Baterai Lap Top
	P.C Unit	LG / Monitor Lg 19	Pembelian	6,500.00	
	Lap Top	Toshiba / i5	Pembelian	7,750.00	
2014	Pick Up	Toyota / Hillux	Pembelian	358,150.00	Mutasi dari aset sesuai sk bupati no. 347 tahun 2014
2013	Mesin Pembuat Es	LG / Tempered Glass	Pembelian	1,800.00	
	Dispenser	Politron / WD 189 H	Pembelian	1,150.00	

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Donati / DO 33 EC	Pembelian	2,215.00	Kursi Kerja Eselon III
	Distiling Apparatus	LG / Lokal	Pembelian	8,774.20	
2012					
	Lemari Kayu	Lokal / 2 Pintu	Pembelian	3,400.00	
	Kipas Angin	Maspion / Duduk	Pembelian	375	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	2,000.00	Meja 1/2 Biro
	Lap Top	AC Adaptor Toshiba / Core i5	Pembelian	396	Cash Lap top
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Toyosaki / Boster AIO 235	Pembelian	867	
2010	mesin hitung/mesin jumlah lainnya (dst)	Citizen / SDC 868 L	Pembelian	350	
	Camera Film	Sony / Dsc w810	Pembelian	3,448.50	
2009	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah	ISUZU / TBR 54F TURBO	Pembelian	237,250.00	Dropping dari DPKA
	Truck Crane	Isuzu / TRUK	Pembelian	235,000.00	
	Lemari Penyimpan	Lokal / Dua Pintu	Pembelian	1,871.40	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	6,109.80	
2008	Rak-Rak Penyimpan	Lokal / 12 Rak	Pembelian	1,000.00	Rak buku
	Rak-Rak Penyimpan	Lokal / 8 Rak	Pembelian	500	Rak buku
	Jam Elektronik	Mirado / Dinding	Pembelian	100	
	Sirine (Proteksi Lingkungan)	strobo / Panjang 4 Lampu	Pembelian	5,000.00	
2007	Kursi Tamu	Lokal / Panjang minimalis	Pembelian	2,500.00	
	Kursi Lipat	Citose / Lipat	Pembelian	400	
	Sound System	Thosiba / HI - FI Shound System	Pembelian	4,000.00	

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	2,185.00	
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	805	Meja Kerja 1/2 Biro
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	805	Meja Kerja 1/2 Biro
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Lokal / Setengah Biro	Pembelian	805	Meja Kerja 1/2 Biro
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Putar	Pembelian	850	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Putar	Pembelian	1,700.00	
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / Putar	Pembelian	850	
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	Lokal / Lokal	Pembelian	9,500.00	
	Pistol	Shotgan / HS 9	Pembelian	60,000.00	Laras pendek
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	52,000.00	
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	8,000.00	
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	12,000.00	
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	4,000.00	
	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	4,000.00	
	Tenda	Lokal / Kain	Pembelian	15,250.00	
2006	Meja Komputer	Lokal / 1 biro	Pembelian	140	
	Pick Up	Ford / RANGER DOUBLE	Pembelian	350,000.00	SEMULA EA 90 AA
	Pesawat Telephone	Panasonic / KX-TS505MX	Pembelian	800	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	162	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	162	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	324	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	

TAHUN PEMBELIAN	NAMA BARANG	MERK/TYPE	STATUS	HARGA (RP)	KET
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	108	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	108	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	108	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	702	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	540	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	972	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	216	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	702	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	162	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	162	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	1,242.00	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	54	
	Pentung	Tonfa / gk pro 60 cm	Pembelian	2,484.00	
2004	Tameng	Fiberglas / Tembus Pandang	Pembelian	60,000.00	

Sumber Data : Bagian umum dan kepegawaian satpolPP Kab. Sumbawa, Desember 2024

Tabel 2.10 Keadaan Sarana Prasarana berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sumbawa

No	JENIS SARANA PRASARANA	SATUAN	KEBUTUHAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	GEDUNG KANTOR	Unit	1	1		belum sesuai standar permendagri 17 Tahun 2019 (7 fasilitas/ Ruangan Belum ada
1.1	Ruang kerja pimpinan & Staf	Ruang	1	1		
1.2	Ruang pos jaga	Ruang	2		2	TIDAK ADA
1.3	Ruang rapat;	Ruang	1	1		TIDAK ADA
1.4	ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;	Ruang	1		1	TIDAK ADA
1.5	ruang penyimpanan barang/Gudang	Ruang	1		1	TIDAK ADA

No	JENIS SARANA PRASARANA	SATUAN	KEBUTUHAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.6	ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;	Ruang	1		1	TIDAK ADA
1.7	ruang sidang majelis kode etik;	Ruang	1		1	TIDAK ADA
1.8	tempat apel/upacara; dan	Ruang	1	1		Tersedia menggunakan lapangan kantor Bupati
1.9	halaman parkir	Halaman	1		1	TIDAK ADA
2	KENDARAAN OPERASIONAL	Unit	21	5	18	Baru ada 5 kendaraan Operasional sesuai Standar
2.1	Motor Operasional	Unit	10	0	10	TIDAK ADA
2.2	jenis <i>offroad/jeep</i> ,	Unit	2	0	2	TIDAK ADA
2.3	mini bus Kegiatan pengawasan dan penyuluhan Perda dan Perkada	Unit	2	0	2	TIDAK ADA
2.4	truk kecil,	Unit	2	1	1	1 Rusak Berat
2.5	truk sedang	Unit	3	3	0	Kegiatan Pamwal (keadaan 1 Unit Rusak Ringan RR dan 1 rusak berat RB)
2.6	truk besar pengangkut pasukan	Unit	2	1	1	Truk angkut pasukan Trantibum keadaan rusak ringan
2.7	Speed Boat	Unit	2		2	Belum tersedia
3	PERLENGKAPAN OPERASIONAL	Set	1		1	perlu dilengkapi sesuai standar
3.1	Perorangan;	Set	740	462	278	
3.1	pakaian dinas;	Buah	203	197	6	Opsional
3.2	tonfa dan holster tonfa;	Buah	165	35	130	
3.3	Borgol	Buah	10	5	5	
3.4	tameng;	Buah	165	35	130	
3.5	senter;	Buah	10	10		
3.6	ferplas/tempat air	Buah	165	0	165	TIDAK ADA
3.7	tas atau ransel;	Buah	165	165	165	Opsional
3.8	<i>sleeping bag</i> ;	Buah	165	0	165	TIDAK ADA
3.9	jaket;	Buah	165	165	165	TIDAK ADA
3.10	rompi/ <i>body protector</i> ; dan	Buah	165	165	-	

No	JENIS SARANA PRASARANA	SATUAN	KEBUTUHAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Masker Gas Air Mata	Buah	50	5	45	Masih kurang
3.12	handy talki	Buah	25	10	15	Rusak berta 4 buah
Perlengkapan lainnya		Unit	167	1	166	
3.13	Tenda	Buah	2	1	1	tidak layak pakai
3.14	Matras	Buah	165	0	165	Belum ada
Peralatan Kebencanaan		Set	67		67	Semua peralatan Kebencanaan belum ada
3.15	perahu karet	Unit	2		2	
3.16	rompi pelampung	Buah	20		20	
3.17	tali Res	Meter	20		20	
3.18	Tandu	Buah	5	0	5	
3.19	Pelampung	Buah	20		20	Belum tersedia
JUMLAH			751	572	179	

Sumber Data : Bidang ketenteraman dan ketertiban umum SatpolPP. Desember 2024

Berdasarkan Tabel 2.10 SatpolPP kabupaten Sumbawa sampai dengan saat ini telah memiliki sarana prasarana tapi belum sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2019 tentang pemenuhan Hak PNS Penyediaan sarana dan parsarana minimal, pembinaan tekhnis operasional dan penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja pasal 7 yaitu :

- 1. Gedung Kantor
- 2. Kendaraan operasional
- 3. Kelengkapan operasional

Gedung kantor yang dimiliki saat ini belum mampu menampung jumlah anggota oleh karena itu perlu dilakukan pembangunan gedung baru, menambah jumlah lantai, rehabilitasi sedang berat, maupun pemeliharaan dari gedung yang sudah ada.

Jumlah kendaraan operasional untuk melaksanakan patroli-pun masih kurang, termasuk kendaraan yang mengangkut hasil penertiban yang dilaksanakan oleh SatpolPP, demikian pula perlengkapan personil aparatur juga sudah harus diperbaiki/diganti dengan yang lebih layak untuk menjaga performance SatpolPP Kabupaten Sumbawa.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1 Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian Rencana Strategis PD Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan SPM layanan Dasar Bidang Trantibum	100	100	100	100	100	100
2	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	B	B	B	BB	BB	BB

Sumber data : Subbag Perencanaan dan pelaporan SatpolPP Kab. Sumbawa Besar

Berdasarkan tabel diatas capaian indikator utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subawa telah mencapai target yang telah ditentukan, pada indikator satu Cakupan SPM Layanan dasar Bidang Trantibum merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan layanan dasar Sub Urusan Trantibum secara nasional telah memenuhi target kemudian 1 indikator penunjang dengan capaian telah memenuhi target. Selanjutnya capaian IKK

2.1.3.2 Indikator kinerja Kunci.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Satuan Polisi Praja Kabupaten Sumbawa (urusan Ketenteraman dan ketertiban umum) Tahun 2021-2024, disajikan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2.11 Capaian Indikator Kinerja Kunci
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

NO	Indikator kinerja Kunci (IKK)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan nilai AKIP SatpolPP	60,90	60,91	70,56	78,80	79,36
2	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100	100	100	100	100
4	Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	100	100	100	100	100

Sumber Data : Subbag Perencanaan dan pelaporan SatpolPP Kab. Sumbawa Besar

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Sumbawa terdiri dari kelompok Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Kelompok pelanggar Perda, Kelompok Masyarakat terdampak bencana atau situasi darurat.

2.1.5 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut: Kerjasama Pemberantasan

peredaran Rokok tanpa pita cukai dengan Kantor Bea Cukai Kementerian Keuangan RI.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan daerah yang terinci dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan beririsan dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah:

1. Kriminalitas, kejahatan dan konflik sosial/horizontal masih terjadi, meskipun dari waktu ke waktu cenderung semakin berkurang
2. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik belum berkualitas dan efektif.

Permasalahan yang terkait langsung dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya Penanganan terhadap penduduk yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda danPerkada	Meningkatnya Pelanggaran perda danperkada (1)	Masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
			Belum optimalnya Penyuluhan dan sosialisasi tentang Perda dan Perkada
			Ketersediaan sarana dan prasarana dalam penegakan Perda dan Perkada belum memadai
		Adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (2)	Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam menjaga trantibum
			Kurangnya pembinaan terkait wawasan dan ketrampilan aparatur
			Kurang optimalnya kerja sama dan koordinasi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta aparatpenegak hukum lainnya
			Peran linmas di tingkat kecamatan belum optimal(7)
			Sarana dan prasaranayang tersedia belum memadai (8)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Adanya warga yang terdampak akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (3)	Belum adanya data terkait warga yang terdampak akibat dari pelanggaran perda dan perkada (9)
			Masih minimnya pengetahuan aparaturnya terkait mutu standar pelayanan minimal (10)
	Belum optimalnya kapasitas SDM PPNS Kabupaten	Terbatasnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kapasitas PPNS Kabupaten (4)	Minimnya peningkatan kapasitas PPNS Kabupaten (11)

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kotasatuan Polisi Pamong Praja sebagai pengampuh layanan dan/atau penyelenggaraan layanan dasar Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman & Ketertiban Umum.

Maka permasalahan dan rencana tindak lanjut permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

Tabel 2.13
Rincian Permasalahan dan Tindak Lanjut dalam Rencana aksi SPM

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ketenteraman, Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat	1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100		Metode/SOP	perlu adanya revisi SOP sesuai dengan perubahan regulasi Pusat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi	Selalu tetap mengupdate SOP sesuai dengan perubahan regulasi Pusat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat melalui revisi dll

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						SDM	Kurangnya anggaran Dalam pembiayaan Untuk menunjang Peningkatan Kapasitas SDM PolPP dan Satlinmas.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar benar-benar Dapat memperhatikan alokasi anggaran bagi SatpolPP agar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan Satlinmas dapat ditingkatkan
							Belum memadainya jumlah fungsional Terampil POLPP (PNS) Yang sekarang diisi oleh 40 Orang PNS dan Non PNS 159 Orang Sehingga tidak sesuai Regulasi yang diwajibkan untuk PNS	Perlu meningkatkan status Non PNS (BANPOLPP) menjadi fungsional Terampil POLPP (PNS)
						Sarana dan Prasarana	Kantor SatpolPP saat ini sangat tidak layak sekali karena tidak sesuai dengan Permendagri 17 Tahun 2019 terutama spesifikasi Mengingat SatpolPP pengampung Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum	Melakukan Konsultasi ke Kepala Daerah dan Koordinasi melalui Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan lahan dan pembangunan gedung baru sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
							Kendaraan Operasional yang dimiliki saat ini tidak memadai mengingat yang ada Sekarang hanya 4 Unit yang terdiri dari ; 1 Unit Sepeda Motor dan 4 unit Roda Empat	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Kendaraan Operasional sesuai dengan standar

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Itupun Dalam kondisi yang Rusak sedang dan Berat	Permendagri 17 Tahun 2019
							Perlengkapan personil saat ini Khususnya baju dinas PDL perlu Adanya keseragaman dalam menunjang tugas dan Fungsi Pelayanan dasar SPM Sub Urusan Trantibum.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan Kendaraan Operasional sesuaikan sesuai dengan standar Permendagri 17 Tahun 2019
						Anggaran	Masih kurangnya Alokasi anggaran Untuk pemenuhan SPM mengingat Satuan Polisi Pamong Praja Merupakan salah satu pengemban Tugas Urusan Wajib pelayanan dasar (SPM) Sub Urusan Trantibum.	Melakukan Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) agar dapat benar-benar dapat memperhatikan alokasikan anggaran bagi SatpolPP agar layanan Dasar SPM Sub Urusan Trantibum dapat terpenuhi secara maksimal
						Perilaku Masyarakat	Masih rendahnya Pemahaman masyarakat terhadap layanan dasar akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yang dilakukan oleh SatpolPP sehingga sebagian Besar masyarakat tidak mau memberikan data pribadinya.	Pentingnya melakukan sosialisasi secara langsung maupun secara tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial terkait dengan penting pelayanan Trantibum

Bidang	No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Layanan	Capaian Layanan (N+1)	Realisasi Mutu	Kategori Permasalahan	Rincian Masalah	RTL Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Hubungan / tata kerja dengan lembaga/ PD lain	Perangkat Daerah lain belum memahami tugas dan fungsi SatpolPP sebagai penagakan Perda dan Perkada secara utuh yang peranannya bukan bersifat situasional akan tetapi merupakan tugas dan fungsi yang melekat	membuat regulasi berupa kerjasama atau MOU

Sumber Data : Rencana aksi SPM Sub urusan Trantibum

2.2.2 Isu strategis

Isu strategis atau kondisi aktual sebagai arus utama perangkat daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, baik berupa isu global, nasional dan regional. Kondisi tersebut disajikan pada Tabel 2.14 berikut.

Tabel 2.14 Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Manajemen tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal sub urusan trantibum.	Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Pengurangan sampah plastik melalui program Zero Waste	Pengurangan penggunaan plastik	Penerapan prinsip 3R (reduce reuse recycle)	Adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum didalam masyarakat
	Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				Meningkatnya pelanggaran terhadap perda dan perkada

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	perda dan perkara oleh Satpol PP					
	Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelanggaran Produk Hukum Daerah
	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri misalnya PPUPD, Pemadaam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja	Keamanan dan Ketertiban Lingkungan				Ketersediaansa rana dan prasarana dalam penyelenggaraa n ketertiban umum belum memadai

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, berperan dalam meningkatkan kualitas layanan dasar urusan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas dan tata kelola birokrasi yang transformatif agar terwujud institusi pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang solutif terhadap permasalahan daerah. Sebagai *Penegakan Perda/Perkada, Penyelenggaraan Ketententeraman Dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan masyarakat* Satuan Polisi Pamong Praja berusaha mengimplementasikan sikap “**SATPOLPP**” sebagai upaya kontinyu membenahan birokrasi internal yang menjadi acuan dan motor penggerak motivasi, konsepsi dari apa yang diinginkan dan mempengaruhi dalam menentukan tindakan terhadap cara dan juga tujuan yang ingin dicapai, bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap. Nilai yang dikembangkan adalah SATPOLPP dengan uraian sebagai berikut:

S.A.T.P.O.L.P.P"Semangat Aman, Tegas, Profesional, Organisasi, Loyal, Peduli, Penuh Perhatian" merupakan sebuah singkatan yang dirancang untuk menggambarkan nilai-nilai penting yang harus dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut penjelasan dari masing-masing kata dalam jargon ini:

Semangat:

Semangat menggambarkan antusiasme dan tekad yang tinggi dari anggota Satpol PP untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh energi dan motivasi. Tanpa semangat yang tinggi, setiap tugas yang dilakukan akan terasa berat, namun dengan semangat, mereka bisa bekerja lebih efektif dan berdedikasi.

Aman:

Aman mengacu pada tujuan utama Satpol PP, yaitu menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Keamanan adalah hal yang fundamental untuk menciptakan lingkungan yang damai dan nyaman bagi warga, yang menjadi prioritas utama Satpol PP.

Tegas:

Tegas menunjukkan bahwa Satpol PP harus mampu membuat keputusan yang jelas dan tidak ragu-ragu dalam menjalankan tugas mereka. Ketegasan ini penting untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga disiplin di masyarakat, tanpa kompromi.

Profesional:

Profesional menggarisbawahi pentingnya sikap profesionalisme dalam bekerja. Anggota Satpol PP harus memiliki keahlian, keterampilan, dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka dengan baik, serta selalu menjaga etika dan standar kerja yang tinggi.

Organisasi:

Organisasi mencerminkan pentingnya struktur dan kerjasama yang baik dalam internal Satpol PP. Semua anggota harus bekerja sebagai bagian dari sebuah organisasi yang solid, dengan tujuan bersama yang jelas, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan tersebut.

Loyal:

Loyal menekankan kesetiaan anggota Satpol PP terhadap tugas mereka, serta kepada negara dan masyarakat. Loyalitas ini memastikan bahwa Satpol PP tetap berdedikasi dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal yang bisa mengganggu integritas mereka dalam menegakkan hukum.

Peduli:

Peduli menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya bertugas menegakkan aturan, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Anggota Satpol PP harus sensitif terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga, serta berusaha memberi solusi yang bijaksana.

Penuh Perhatian:

Penuh Perhatian berarti Satpol PP harus selalu waspada dan peka terhadap dinamika yang terjadi di masyarakat. Mereka harus siap mendengarkan, memahami, bertindak dengan bijak, Humanis dan persuasif terhadap situasi yang muncul agar masyarakat merasa diperhatikan dan dilayani dengan baik.

Kesimpulannya:

Jargon S.A.T.P.O.L.P.P ini menggambarkan karakter dan kualitas yang harus dimiliki oleh anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas, yaitu semangat yang tinggi, menjaga keamanan, ketegasan dalam bertindak, sikap profesional, organisasi yang solid, loyalitas terhadap tugas, kepedulian terhadap masyarakat, dan perhatian yang detail terhadap setiap situasi yang terjadi.

3.1 Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

Merujuk pada petunjuk penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD secara *inline* (terkait langsung) menjadi tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sumbawa 2025-2029 dan NSPK Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum”**. Tujuan tersebut merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai hingga tahun 2029. Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, indikator dan formulasi, disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Tujuan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

No	NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator	Sumber/ Formulasi
1	Meningkatnya keamanan, kesadaran politik dan demokrasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi	e-spm kemendagri
2	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	BKPSDM
3	Meningkatnya kualitas, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Skor Hasil Evaluasi Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Bagian Pemerintahan Setda. Kabupaten Sumbawa

3.2 Sasaran Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029
Adapun sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1. Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan Perangkat Daerah
- 3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber/Formulasi
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi		
	Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)	Poin	<u>e-spmkemendagri.go.id</u>
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN		
	Meningkatnya Profesionalitas ASN Satpol PP	Kategori Indeks Profesionalitas ASN Satpol PP	Kategori	BKPSDM
		Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Kategori AKIP Satpol PP	Kategori	Inspektorat

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE KINERJA 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		Tingkat Pencegahan Konflik Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
	Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)	Poin	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Point	76,54	79,61	82,81	86,13	89,58	93,18	96,92
	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN SatpolPP	Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Skor Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	66,04	68,83	71,63	74,42	77,22	80,01	82,00
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas SatpolPP	Kategori Nilai AKIP SatpolPP	Kategori	BB	A	A	A	A	A	AA

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan untuk keseluruhan periode Rencana Strategis (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing- masing tujuan. Secara rinci target kinerja SatpolPP Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis SatpolPP Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3T.2 Penahapan Rencana Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026-2030

Tujuan	TAHAP I 2025	TAHAP II 2026	TAHAP III 2027	TAHAP IV 2028	TAHAP V 2029	TRANSISI 2030
Prioritas Pemba-nguan secara Umum (<i>General Priority</i>)	Membangun landasan regulasi, data, dan sarana prasarana dasar; menyiapkan sistem.	Mempercepat implementasi program prioritas; memperluas cakupan sasarannya	Memantapkan capaian; fokus peningkatan kinerja utama dan kinerja kunci untuk pemenuhan target jangka menengah.	Diversifikasi dan peman-tapan pelak-sanaan urusan ketenteraman dan ketertiban umum	Konsolidasi seluruh capaian; menuntaskan target Rencana Strategis; mempersiapkan transisi ke periode selanjutnya	Tahun 2030 merupakan tahun transisi dan harmoni-sasi.
Meningkatnya Nilai-Nilai Sosial Budaya Dalam Masyarakat	Indeks Penerapan SPM Trantibumlinmas: Penyusunan strategi Penerapan Indeks SPM Trantibumlinmas	Indeks Penerapan SPM Trantibumlinmas: Pengelolaan Strategi untuk mendukung Peningkatan Indeks SPM Trantibumlinmas	Indeks Penerapan SPM Trantibumlinmas:: Penggunaan beragam strategi yang efektif untuk menunjang peningkatan indeks SPM Trantibumlinmas	Indeks Penerapan SPM Trantibumlinmas: Integrasi pengelolaan strategi penerapan Indeks SPM Trantibumlinmas yang efektif secara lebih detail	Peningkatan Indeks SPM Trantibumlinmas	Di tahun 2030, Pemerintahan & Birokrasi Unggul difokuskan untuk menginteg-rasikan semua hasil reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan upaya peningkat-an kapasitas fiskal yang telah dicapai. Dengan masa transisi, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan struktur dan sistem pengelola-an keuangan agar siap memasuki periode Rencana Strategis berikutnya sesuai arahan RPJMD masaTran-sisi
Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi: Penyiapan Proses bisnis dan SOP layanan publik inti dan pendukung OPD, pemetaan sarana prasarana, Perjanjian Kinerja, rencana aksi kinerja	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Perkuatan Implementasi manajemen kinerja, optimaalisasi penerapan e-kinerja dan sistemnformasi SAKIP, meningkatkan skor SAKIP OPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Peningkatan efekrtivitas sistem layanan, reviu kinerja, sistem informasi SAKIP lebih sempurna, “BB”/“A” SAKIP, perluasan jangkauan Pelayanan.	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Percepatan pencapaian target kinerja bidang urusan bidang Trantibum, peningkatan kapasitas SAKIP OPD	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi : Konsolidasi kinerja, optimaalisasi sumber daya dalam pencapaian target jangka menengah.	

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PD
1	Meningkatnya nilai-nilai sosial budaya dalam Masyarakat	1. Pemberdayaan lembaga adat, sanggar budaya, dukungan event kebudayaan di desa. 2. Kurikulum muatan lokal di sekolah. 3. Dokumentasi dan digitalisasi naskah/situs budaya. 4. Kolaborasi kegiatan kebudayaan dengan pariwisata (festival budaya, pameran). 5. Pembentukan desa wisata berbasis budaya.	Pemenuhan Cakupan Pelayanan SPM Bidang Trantibum	1. Mengevaluasi dan menyusun SOP sesuai standar 2. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sesuai standar 3. Peningkatan kapasitas aparatur 4. Pembinaan Satlinmas 5. Penyediaan layanan bagi warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada 6. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi 7. Peningkatan pengawasan Penegakan Perda dan Perkada 8. Peningkatan kompetensi PPNS 9. Melakukan deteksi dini dan cegah dini gangguan Trantibum 10. Meningkatkan kegiatan patroli 11. RutinMelakukan pengamanan tempat-tempat Vital 12. Melaksanakan pengawalan pejabat daerah dan pejabat negara 13. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa Pendidikan dan pelatihan formal
2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di tiap OPD 2. Evaluasi kinerja berkala, pelaporan berbasis aplikasi online 3. Integrasi e-Planning, e-Budgeting, dan e-Monev. 4. Pelibatan masyarakat & akademisi dalam evaluasi kinerja OPD.	Optimalisasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	1. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 2. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 3. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja 4. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja 5. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	STRATEGI PD	ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS PD
				Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja 6. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja 7. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja 8. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja 9. Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja

3.4 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan pembangunan. Arah kebijakan yang seiring dengan strategi untuk setiap sasaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.4
Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urususan Trantibum

Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pelayanan	Indikator Mutu Pelayanan	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Ketenteraman , Ketertiban Umum & Pelindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Jumlah dan Jenis barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang trantibumlinmas	Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteram an dan Ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Bidang	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Pelayanan	Indikator Mutu Pelayanan	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4	5	6
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
					Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
				Optimalisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
					Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
					Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
				Optimalisasi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.1 Uraian Program

Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis maka Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum dalam lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan lingkungan masyarakat guna meningkatkan rasa tenteram, tertib dan teratur dalam lingkungan masyarakat sehingga tercapainya SPM urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar sub urusan trantibum pada umunya.

b. Program urusan penunjang perangkat daerah adalah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah program yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah (SatpolPP) yang mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi umum hingga pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa, serta IKU dan IKD/IKK pada urusan yang diampuh (urusan Trantibum), maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Kabupaten Sumbawa

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan teratur di wilayah kabupaten Sumbawa melalui rangkaian aktifitas meliputi. Patroli, pengamanan, pamwal, penertiban, penanganan Unjuk rasa, peningkatan kapasitas linmas dengan memberdayakan anggota Satlinmas Kabupaten. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa mencakup seluruh masyarakat penerima layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun. 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Pelaksanaan kegiatan ini berbagai pihak pemangku perangkat daerah selaku Pengampung Perda/Perkada, Desa/Kelurahan, Kelompok Masyarakat, dan dengan sasaran seluruh masyarakat Kabupaten Sumbawa. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman,mencegah terjadinya konflik sosial, mendukung kelancaran pelayanan publik dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat wilayah Kab. Sumbawa <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan menjalin kerjasama berbagai pihak seperti, TNI/POLRI,Perangkat Daerah Terkait dan partisipasi dari masyarakat.
2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini meliputi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029.

No	Program	Kegiatan	Uraian Operasional Kegiatan
			<u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat melibatkan berbagai pihak yaitu TNI/POLRI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, perangkat daerah terkait, Kecamatan, dan Kelurahan <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah, memberikan kepastian hukum serta mendukung pembangunan Daerah. <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan tahapan, perencanaan dengan cara menyusun strategi kegiatan, pengorganisasian dengan membentuk tim terpadu yang terdiri dari pengampuh Perda dan pihak terkait (Polri, kejaksaan dan pengadilan), pelaksanaan dengan sosialisasi , pengawasan, penindakan, dan Monev Kegiatan Penegakan Perda/perkada
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	<u>Nama Kegiatan:</u> Kegiatan ini meliputi implementasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan teknis PPNS, pembinaan umum, rapat koordinasi untuk meningkatkan sinergi antar PPNS berbagai Perangkat Daerah, serta antar PPNS dan aparat penegakan hukum, penyusunan pedoman dan Monev kegiatan PPNS sehingga dapat meningkatkan kemampuan tekhnis PPNS sesuai dengan bidang tugas masing-masing. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh pada wilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Waktu Pelaksanaan:</u> Pelaksanaan kegiatan ini secara rutin dilaksanakan setiap tahun, tahun 2025-2029. <u>Pihak yang Terlibat:</u> Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan PPNS SatpolPPdan PPNS Perangkat Daerah lainnya serta aparat penegakan hukum. <u>Manfaat Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan untuk peningkatan implementasi dan kualitas penegakan hukum terutama penegakan Perda/Perkada dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peningkatan efisiensi dan efektifitas penyidikan, penguatan koordinasi antar Lembaga penegakan Hukum serta peningkatan profesionalitas PPNS <u>Teknis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Dalam teknis pelaksanaan, kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan PPNS perangkat daerah Terkait dan aparat penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan).

Pemetaan subkegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang mendukung kegiatan sesuai tujuan dan sasaran, serta IKU dan IKD/IKK Renstra Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sumbawa, maka uraian rumusan program/kegiatan/subkegiatan Satuan Polisi Pamong Praja disajikan secara berurutan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Subawa Tahun 2025-2029

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Meningkatnya Keamanan Keamanan Kesadaran Politik dan Demokrasi Masyarakat	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				Tingkat Pencegahan Konflik Politik dan Demokrasi		BUPATI
			1	Terjaganya Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)		KASAT
					1	Optimalnya penyelesaian gangguan trantibum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KABID TIBUMTRANMAS
						1	Terlaksananya penanganan gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KABID TIBUMTRANMAS
						1	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KASI KERJASAMA
						2	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	KASI KERJASAMA
						3	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengam	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					4	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN
					5	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	KASI KERJASAMA
					6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	KASI KERJASAMA
					Tersedianya Anggota Satlinmas yang terlatih		Persentase anggota Satlinmas terlatih	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	KABID LINMAS
					1	Terlaksananya Pelatihan anggota Satlinmas	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KABID LINMAS
					1	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	KASI BINA POTENSI
					2	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	KASI SATLINMAS

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
					3	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	KASI BINA POTENSI
					4	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1.05.02.2.01.0019 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	KASI BINA POTENSI
						Meningkatnya kapasitas anggota SatpolPP	Persentase Peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	KABID KSDA
					1	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas anggota SatpolPP	Jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KABID KSDA
					1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	KASI DIKLATSARFUNG
					2	Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1.05.02.2.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	KASI DIKLATSARFUNG
					3	meningkatkan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	KASI DIKLATSARFUNG

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					4	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	KASI SDA dan SDM
					5	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	KASI SDA dan SDM
					2	Terlaksananya pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten	Jumlah Dokumen hasil pembinaan PPNS Kabupaten	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	KABID KSDA
					6	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	KASI SDA dan SDM
					7	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	KASI DIKLATSARFUNG
				4	Optimalisasi pelaksanaan penegakan Perda/Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	KABID P2UD
					1	Terlaksananya penegakan perda/perkada	Jumlah perda dan perkada yang ditegakkan	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	KABID P2UD
					1	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KASI WASLU
					2	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KASI WASLU

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	KASI WASLU
					4	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KASI LIDIK
					5	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	KASI LIDIK
					6	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	KASI LIDIK
					7	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KASI WASLU
					8	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	KASI LIDIK
					9	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	KASI WASLU
					2	Tersedianya Dokumen hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) Kabupaten	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipi (PPNS) Kabupaten	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	KABID P2UD

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					10	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS	KASI LIDIK
					11	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	KASI LIDIK
					12	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	KASI LIDIK
			2	Meningkatnya Kualitas akuntabilitas kinerja SatpolPP			Kategori nilai AKIP SatpolPP		KASAT
				1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja		Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	SEKDIS
					1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran PD	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
					1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
					2	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
					3	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME		OUTPUT		S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
									4	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
									5	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
									6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
									7	tersedianya laporan evaluas kinerja perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	KASUBBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN
								2		Meningkatnya kualitas dan pelaporan keuangan SatpolPP	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan SatpolPP	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan PD	KASUBBAG KEUANGAN
									1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KASUBBAG KEUANGAN
									2	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	KASUBBAG KEUANGAN
									3	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	KASUBBAG KEUANGAN
									4	Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	X.XX.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	KASUBBAG KEUANGAN

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						Pelaksanaan Akuntansi SKPD			
					5	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KASUBBAG KEUANGAN
					6	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	X.XX.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	KASUBBAG KEUANGAN
					7	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KASUBBAG KEUANGAN
					8	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	X.XX.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KASUBBAG KEUANGAN
					3	Tersusunnya Dokumen Administrasi BMD pada PD	Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada PD	X.XX.01.2.03 Administrasi BMD pada PD	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					1	Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					2	Tersedianya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					4	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada SatpolPP	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum PD	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					1	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					2	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					3	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					4	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					5	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					6	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	X.XX.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					5	Tersusunnya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					3	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					6	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					1	Tersedianya Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					2	Tersedianya Paket Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					3	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					4	Tersedianya Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					7	Tersusunnya Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
					3	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
			3	Meningkatnya Kualitas Profesionalitas ASN SatpolPP			Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP		KASAT

NO	SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN		SASARAN		OUTCOME	OUTPUT	S-SUB KEGIATAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
						1	Meningkatnya Profesionalitas ASN SatpolPP		IP- ASN Satuan Polisi Pamong Paraja	X.XX.01 Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	SEKDIS
							1	Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Kapasitas ASN PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian PD	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
								1 Tersedianya Unit Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	X.XX.01.2.05.0001 Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
								2 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
								3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
								4 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN
								5 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

Tabel 4.2 a. Kegiatan dan Uraian Subkegiatan

No.	Kegiatan	Subkegiatan
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota b. Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum c. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia d. Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum e. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat f. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional g. Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP h. Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan i. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat j. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas k. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan l. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa m. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah n. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum o. Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	p. Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. q. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah r. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) s. Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah t. Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah u. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah v. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah w. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah

No.	Kegiatan	Subkegiatan
		x. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	y. Pembentukan Sekretariat PPNS z. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah aa. Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah bb. Dukungan Operasional Sekretariat PPNS cc. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
7	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	dd. Evaluasi Kinerja PD ee. Penyusunan Dokumen Perencanaan PD ff. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD gg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD hh. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD ii. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD jj. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	kk. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ll. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN mm. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD nn. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD oo. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD pp. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD qq. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan rr. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
9	Kegiatan Administrasi BMD pada PD	ss. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
10	Administrasi Umum PD	tt. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor uu. Fasilitasi Kunjungan Tamu vv. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ww. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan xx. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	yy. Penyediaan Jasa Surat Menyurat zz. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik aaa. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kant
12	Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	bbb. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ccc. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ddd. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.3 Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Subkegiatan merupakan bagian lebih rinci dari suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai keluaran tertentu dalam kegiatan tersebut.

Uraian operasional subkegiatan pada dasarnya linier/searah dengan uraian operasional kegiatan sebagaimana rincian pada Tabel 4.1. Subkegiatan yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Tabel 4.2 di atas merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

Uraian operasional subkegiatan yang telah disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

1. Nama Subkegiatan

Nama subkegiatan mencakup seluruh jenis subkegiatan yang telah dipetakan untuk diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Tabel 4.3 di atas, baik yang merupakan subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar maupun subkegiatan sebagai pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan.

2. Lokasi Subkegiatan

Subkegiatan sebagai urusan pemerintahan wajib dilaksanakan pada seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Sementara itu, subkegiatan sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan pada Perangkat Daerah (internal) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

3. Waktu Pelaksanaan

Semua subkegiatan secara rutin dilaksanakan pada setiap tahun, yaitu tahun 2025-2029.

4. Pihak yang Terlibat

Pelaksanaan berbagai subkegiatan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar melibatkan berbagai pihak sebagai berikut : perangkat Daerah pengampuh Perda/Perkada, instansi terkait (TNI, POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan), sebagai urusan penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh semua bidang/unit pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.

5. Manfaat Subkegiatan

Pelaksanaan berbagai subkegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas penanganan pelanggaran Perda/Perkada, Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Patroli rutin, pengamanan dan pengawalan penertiban serta penanganan unjuk rasa.
- b. Meningkatkan kapasitas SDM SatpolPP dan Satlinmas dalam mendukung penanganan pelanggaran Perda/Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
- d. Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur.
- e. Meningkatnya kualitas PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.
- f. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik meliputi peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan

transparansi dalam penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan perangkat daerah.

- g. Mendukung tata kelola administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dalam memastikan pengelolaan keuangan sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Tata kelola BMD yang tertib, transparan, dan efisien.
- i. Menjamin tertib administrasi dalam membantu mempercepat proses pelayanan, baik internal maupun eksternal perangkat daerah dan analisis pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
- j. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- k. Terjaganya fungsi dan kualitas BMD.

6. Teknis Pelaksanaan Subkegiatan

Semua subkegiatan dilaksanakan dengan pola pengelolaan sendiri dan berkolaborasi dengan OPD terkait sebagai mitra yang mempunyai tugas, fungsi dan kewenangan dalam penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sebagai pengampu SPM layanan dasar sub urusan Trantibum berada

dibawah koordinasi Direktur Jenderal Bina Asministrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

Rencana program, kegiatan dan subkegiatan, beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan transisi tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Rencana program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan transisi tahun 2030 pada tebel 4.3 berikut.

Tabel 4.3 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan Rencana Strategis PD Tahun 2025-2029

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A		Indeks Penerapan SPM Trantibum	%`	100	100	2,179,842,500	100	2,354,232,060	100	2,519,028,304	100	4,842,124,613	100	5,722,651,854	100	6,404,417,985
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	302,429,000	100	774,973,446	100	732,573,017	100	2,099,244,714	100	2,352,982,492	100	2,630,582,442
1	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengaduan Trantibum yang ditangani	Laporan	171	150	302,429,000	130	774,973,446	110	732,573,017	90	2,099,244,714	70	2,352,982,492	50	2,630,582,442
1	1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	6	6	49,017,000	6	150,000,000	6	150,000,000	6	258,000,000	6	350,000,000	6	400,000,000
2	1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	5	5	14,500,100	5	20,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	12	12	63,334,000	12	106,000,000	12	106,000,000	12	215,000,000	12	250,000,000	12	300,000,000
4	1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuha Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	12	12	168,077,900	12	100,000,000	12	110,000,000	12	250,000,000	12	350,000,000	12	400,000,000
5	1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani	Laporan		12	7,500,000	12	25,692,824	12	10,692,824	12	11,000,000	12	11,000,000	12	25,000,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	-	1	5,600,000	7	373,280,622	8	330,880,193	1	1,340,244,714	1	1,366,982,492	2	1,480,582,442
2	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan kapasitas SDM SatpolPP	%	100	100	67,386,500	100	410,632,813	100	528,641,910	100	665,735,720	100	752,662,724	100	832,619,817
2	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah anggota Satpolpp yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi	orang	200	200	60,386,500	200	295,038,100	200	358,241,910	200	487,495,720	200	569,098,724	200	639,699,817
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	200	200	40,223,000	200	35,000,000	202	35,000,000	202	120,000,000	202	140,000,000	202	141,000,000
2	1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Fungsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang	-	-	-	6	95,038,100	10	151,241,910	10	160,495,720	20	200,098,724	6	247,699,817

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	1.05.02.2.01.0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabata Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Dokumen	1	1	-	1	5,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	8,000,000
4	1.05.02.2.01.0012 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Orang	3	3	20,163,500	6	10,000,000	7	15,000,000	8	50,000,000	9	60,000,000	10	70,000,000
5	1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang	40	40		40	150,000,000	40	150,000,000	40	150,000,000	40	162,000,000	40	173,000,000
3	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pembinaan PPNS Kabupaten	Dokumen	4	4	7,000,000	4	115,594,713	4	170,400,000	4	178,240,000	4	183,564,000	4	192,920,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	orang	(4)	1	-	2	83,594,713	2	100,400,000	2	103,240,000	2	108,564,000	5	110,420,000
7	1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	4	1	7,000,000	4	32,000,000	4	70,000,000	4	75,000,000	4	75,000,000	4	82,500,000
3	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase anggota Satlinmas terlatih	%	100	100	64,737,750	100	549,846,412	100	601,805,662	100	839,034,001	100	875,735,702	100	936,517,990
3	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Satlinmas yang Terlatih	Orang	730	30	64,737,750	154	549,846,412	154	601,805,662	154	839,034,001	154	875,735,702	154	936,517,990
1	1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4	-	-	4	50,000,000	4	62,000,000	4	85,000,000	4	100,000,000	4	130,000,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	4	5	15,000,000	5	54,000,000	5	61,000,000	5	175,000,000	4	180,000,000	4	181,500,000
3	1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungar Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Pelindungan masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	430	30	26,321,500	154	380,846,412	154	408,805,662	154	407,034,001	154	420,735,702	154	439,517,990
4	1.05.02.2.01.0019 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen	-	165	23,416,250	165	65,000,000	165	70,000,000	165	172,000,000	165	175,000,000	165	185,500,000
4	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	1,745,289,250	100	618,779,389	100	656,007,715	100	1,238,110,178	100	1,741,270,936	100	2,004,697,736
4	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah perda dan perkada yang ditegakan	Dokumen	1	1	1,743,498,750	1	520,846,412	1	553,805,660	1	1,024,634,000	1	1,442,500,000	78	1,699,287,289
1	1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	12	12	-	12	45,000,000	12	50,000,000	12	155,000,000	12	160,000,000	12	172,000,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	3	80,400,000	3	40,000,000	3	40,000,000	3	45,000,000	3	45,000,000	3	50,000,000
3	1.05.02.2.02.0006 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpana Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-	-	5,600,000	3	90,000,000	1	95,000,000	1		1	105,000,000		207,077,289
4	1.05.02.2.02.0007 Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	12	-	12	100,000,000	12	110,000,000	12	115,000,000	12	175,000,000	12	215,000,000
5	1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	-	5	-	5	20,000,000	5	20,000,000	5	200,000,000	5	250,000,000	5	300,000,000
6	1.05.02.2.02.0009 Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	-	22	-	22	15,846,412	22	18,805,660	22	69,034,000	22	172,500,000	22	200,210,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4	12	15,060,750	12	55,000,000	12	55,000,000	12	100,600,000	12	120,000,000	12	170,000,000
8	1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	4	12	38,210,000	12	100,000,000	12	105,000,000	12	210,000,000	12	250,000,000	12	220,000,000
9	1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	4	12	1,604,228,000	12	55,000,000	12	60,000,000	12	130,000,000	12	165,000,000	12	165,000,000
3	1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Kabupaten/Kota	Jumlah hasil Kerjasama PPNS Kabupaten	Dokumen	4	4	1,790,500	4	97,932,977	4	102,202,055	4	213,476,178	4	298,770,936	4	305,410,447

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	1	1	-	1	20,489,590	1	22,538,544	1	54,096,078	1	52,748,986	1	55,998,800
11	1.05.02.2.03.0003 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	-	1	1,790,500	1	23,443,387	1	24,381,601	1	100,000,000	1	157,083,239	1	160,079,065
12	1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	1	6	-	6	54,000,000	6	55,281,910	6	59,380,100	6	88,938,711	6	89,332,582
B		Kategori Nilai AKIP SatpolPP		BB	A	8,285,027,315	A	8,589,322,204	A	8,996,680,778	A	11,530,337,981	A	11,535,929,189	A	11,807,863,940
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP SatpolPP	NILAI		81,35	8,285,027,315	83,35	8,589,322,204	85,35	8,996,680,778	87,35	11,530,337,981	89,35	11,535,929,189	91.35	11,807,863,940
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen		7	65,633,700	7	91,024,373	7	95,554,092	7	133,463,309	7	136,046,952	7	142,523,579

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	19,677,400	3	27,464,496	3	28,283,076	3	29,347,230	3	30,688,064	3	32,346,228
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		2	3,540,600	2	3,682,224	2	3,829,513	2	14,020,989	2	14,262,248	2	14,560,605
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		2	4,544,000	2	4,725,760	2	4,914,790	2	15,160,530	2	15,470,161	2	15,853,073
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		2	2,998,000	2	3,117,420	2	3,242,117	2	13,404,223	2	13,608,476	2	13,861,070
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen		2	3,275,000	2	3,406,000	2	4,914,790	2	10,160,530	2	11,470,161	2	12,853,073

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan		4	17,820,500	4	30,095,153	4	31,095,153	4	32,095,154	4	30,095,153	4	31,095,153
7	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		4	13,778,200	4	18,533,320	4	19,274,653	4	19,274,653	4	20,452,689	4	21,954,377
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang ditargetkan	Dokumen	293	293	7,287,355,565	293	7,167,945,612	293	7,172,438,128	293	9,177,325,604	293	9,458,338,445	293	9,670,287,531
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	39	39	4,260,884,665	39	5,086,973,132	39	5,086,973,132	39	6,950,923,229	39	7,112,000,000	39	7,210,215,000
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	29	29	3,014,010,000	29	2,062,740,000	29	2,063,953,216	29	2,164,950,877	29	2,278,327,929	29	2,382,310,884
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	250	250	1,155,900	250	2,500,000	250	2,700,000	250	10,000,000	250	12,200,000	250	13,500,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	1,609,500	12	3,000,000	12	3,500,000	12	10,100,000	12	11,200,000	12	14,000,000
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2,056,000	1	3,000,000	1	3,250,000	1	10,334,959	1	11,475,056	1	13,648,310
6	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	3,271,000	1	3,401,840	1	3,537,914	1	10,671,480	1	11,937,698	1	14,213,337
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	Laporan	16	16	2,241,000	16	3,330,640	16	4,423,866	16	10,045,059	16	11,697,762	16	12,200,000
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	2,127,500	1	3,000,000	1	4,100,000	1	10,300,000	1	9,500,000	1	10,200,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	2	1,795,000	2	3,734,800	2	4,756,193	2	19,677,092	2	21,221,716	2	24,000,000
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1		1,795,000	1	2,066,800	1	2,341,472	1	9,638,546	1	10,060,858		12,000,000
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	-	1	1,668,000	1	2,414,721	1	10,038,546	1	11,160,858		12,000,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan	Dokumen	4	4	289,017,300	4	216,592,500	4	183,916,947	4	442,332,082	4	541,255,845	4	679,378,316
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	-	-		1	1,653,500	1	2,000,000	1	13,556,223	1	4,500,000	2	5,000,000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	141,653,500	6	60,000,000	6	21,260,387	6	122,093,142	6	154,480,094	6	165,136,982

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	34	34	1,549,800	34	2,000,000	34	2,300,000	34	15,500,000	34	17,700,000	34	18,000,000
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	5,439,000	12	5,439,000	12	5,656,560	12	15,939,388	12	16,295,751	12	16,736,459
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	140,375,000	12	145,000,000	12	150,000,000	12	258,243,329	12	330,280,000	12	455,204,875
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	-	-	-	6	2,500,000	6	2,700,000	6	17,000,000	6	18,000,000	6	19,300,000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	Dokumen			7,633,300		16,208,300		18,056,632		40,279,464		48,686,231		55,412,279
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	6,208,300	12	6,208,300	12	6,456,632	12	10,779,464	12	12,186,231	12	17,689,279
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan				6	5,000,000	6	6,000,000	6	12,500,000	6	18,000,000	6	18,500,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4	4	1,425,000	4	5,000,000	4	5,600,000	4	17,000,000	4	18,500,000	4	19,223,000
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit				14	799,663,119	1	1,237,917,186	13	637,260,430	4	641,280,000	4	523,742,235
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				2	700,515,035			8	472,260,430	2	609,720,000	4	413,742,235
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				6	50,000,000			2	105,000,000				50,000,000
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit				4	49,148,084			3	60,000,000	2	31,560,000		60,000,000
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit						1	1,237,917,186						
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	18	18	633,592,450	18	294,153,500	18	284,041,600	18	1,080,000,000	18	689,100,000	18	712,520,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak	Unit	10	10	183,367,450	10	250,000,000	11	260,000,000	11	510,000,000	11	598,670,000	11	610,656,000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	6	6	12,540,000	6	20,000,000	6	24,041,600	6	150,000,000	6	56,210,000	6	64,282,000
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	437,685,000	1	24,153,500	1		1	420,000,000.00	1	34,220,000	1	37,582,000
C		Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP	Kategori	Sedang	Sedang	-	Sedang	20,000,000	sedang	22,000,000	Sedang	107,500,000	Sedang	136,120,000	sedang	143,782,000
3	Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	IP-ASN Satuan Polisi Pamong Praja	Point	-	-	-		20,000,000	77.35	22,000,000	77.37	107,500,000	77.39	136,120,000	77.41	143,782,000
1	Administrasi Kepegawaian PD	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	Orang	-	-	-		20,000,000		22,000,000		107,500,000		136,120,000	1	143,782,000
1	Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarpras Disiplin Pegawai	Unit	-	-	-		2,500,000	1	3,500,000	1	50,500,000	1	75,500,000	1	77,000,000

NO	Urusan/ Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Base line 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
					Base line 2025		2026		2027		2028		2029		2030	
					TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)	TARGET	PAGU (RP)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	-	-	-		2,500,000	1	3,500,000	1	17,000,000	1	17,620,000	1	19,282,000
3	Monitoring, Evaluas dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	-	-		5,000,000	1	5,000,000	1	15,000,000	1	15,500,000	1	17,000,000
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	-	-		5,000,000	1	5,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,500,000
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jmlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	-	-		5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,000,000
TOTAL						10,464,869,815		10,963,554,264		11,537,709,082		16,479,962,594		17,394,701,043		18,356,063,925

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mendukung Program prioritas Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, yang beririsan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagaia berikut:

1. Ramah dan Aman Investasi

Program prioritas tersebut diintegrasikan dalam Program Perangkat Daerah (Satuan Polisi Pamong Praja) yang relevan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (**Ramah dan Aman Investasi**)

Uraian Subkegiatan yang mendukung program prioritas yang sudah diintegrasikan ke dalam program perangkat daerah, disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
1	Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	ditujukan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Prioritas Pendukung
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	melaksanakan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Prioritas Pendukung
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prioritas Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Prioritas Pendukung
			Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Pemberdayaan Pelindungan masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prioritas Pendukung
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prioritas Pendukung
			Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Melaksanakan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Prioritas Pendukung
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Melaksanakan kegiatn sesuai SOP	Prioritas Pendukung
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prioritas Pendukung
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan masyarakat Termasuk dalam	Prioritas Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prioritas Pendukung
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	melaksanakan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Prioritas Pendukung
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	melakukan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prioritas Pendukung
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	melaksanakan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prioritas Pendukung
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Melaksanakan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) Penegakan Peraturan Daerah	Prioritas Pendukung
			Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Melaksanakan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prioritas Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembentukan Sekretariat PPNS	membentuk sekretariat PPNS	Prioritas Pendukung
			Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Menyediakan Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Prioritas Pendukung
			Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	membentuk PPNS Penegak Peraturan Daerah	Prioritas Pendukung
			Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Melaksanakan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Prioritas Pendukung
2	Prorgram Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Evaluasi Kinerja PD	melaksanakan evaluasi kinerja PD sebagai bahan perencanaan	Penunjang Program Prioritas
			Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Menyusun dokumen perencanaan PD baik tahunan maupun jangka menengah	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Menyusun dokumen RKA-SKPD sebagai rencana kegiatan dan anggraan.	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebagai rencana kegiatan dan anggraan	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Menyusunan DPA-SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggraan	Penunjang Program Prioritas

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Menyusun Perubahan DPA-SKPD sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penunjang Program Prioritas
		Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menyediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penunjang Program Prioritas
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Menyusun Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Penunjang Program Prioritas
		Kegiatan Administrasi BMD pada PD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Menyusun Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD	Penunjang Program Prioritas
		Administrasi Umum PD	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penunjang Program Prioritas
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan	Penunjang Program Prioritas
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Untuk memfasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya.	Penunjang Program Prioritas

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Melaksanakan penyediaan kebutuhan jasa surat menyurat	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Penunjang Program Prioritas
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Penunjang Program Prioritas
		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Menyediaan kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penunjang Program Prioritas

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabuapten Sumbawa

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi,

yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 -2029 dan Transisi Tahun 2030

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2029	2030
1	Indeks Penerapan SPM Trantibum (SatpolPP)	100	100	100	100	100	100	100
2	Kategori AKIP SatpolPP	BB	BB	BB	A	A	A	AA
3	Kategori Indeks Profesionalitas ASN SatpolPP	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Termasuk IKK pada Satuan Polisi Pamong Praja Namun ada 1 Indikator kinerja Kunci baru yaitu IP- ASN Satuan Polisi Pamong Praja dengan capaian Point 77.30 pada tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian dari BKPSDM Kabupaten Sumbawa.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 4.6 berikut

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI SATUAN POLISI PAMONG AJA
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025-2030

NO	Indikator kinerja Kunci (IKK)	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	IP- ASN Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	71,3	72	73	74	75	76	77	
3	Persentase SDM SatpolPP yang telah mengikuti Diklatsar	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja	Poin	79,35	81.35	83,35	85,35	87,35	89,35	91,35	
6	Persentase Anggota Satlinmas yang Terlatih	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Sumbawa dalam rangka pencapaian dari Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang diturunkan dalam Program Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan, disusun dengan mempertimbangkan potensi dan masalah sumber daya perangkat daerah, serta isu strategis global, nasional dan regional.

Visi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera”**. Maksudnya adalah Kabupaten Sumbawa dibangun dengan sumberdaya yang unggul melalui perekonomian yang maju untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Visi tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) misi pembangunan yaitu: **Sumberdaya Manusia dan Sosial Budaya Unggul; Pemerintahan dan Birokrasi Unggul; Sumberdaya Alam, Lingkungan dan Infrastruktur Unggul; Perekonomian Maju; dan Masyarakat Sejahtera. Visi dan misi tersebut secara linier direalisasikan melalui 2 (dua) Program yaitu. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dan program penunjang.**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa sebagai pengampuh SPM Urusan wajib pelayanan dasar Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga dituntut memberikan pelayanan extra, untuk itu perlu didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sarana prasarana, (Gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional yang sesuai standar) dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Hal ini ditujukan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, serta agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terdapat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kerangka RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak terkait (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Seluruh bidang kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.

2. Setiap bidang kerja berkewajiban mensinergikan seluruh kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Strategis ini.
3. Penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa.
4. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
5. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa menjadi acuan kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dengan Kepala bidang Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Satuan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Rencana Strategis ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Rencana Strategis ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Rencana Strategis sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Rencana Strategis dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru.

